

## **PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI DI DESA SEI BARANG KECAMATAN KAYAN SELATAN KABUPATEN MALINAU**

**Petrus Rijan<sup>1</sup>**

### ***Abstrak***

**Petrus Rijan.** *Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Di Desa Sei Barang Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau, di bawah bimbingan Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si selaku bimbingan I dan Santi Rande, S.Sos.,M.Si selaku pembimbing II.*

*Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri Di Desa Sei Barang Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau serta faktor-faktor yang mendukung dan penghambat dalam Pembangunan di Desa Sei Barang Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptip kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan yaitu model interatif yang terdiri dari pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data dan penariakan kesimpulan.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri di desa sudah terlihat baik. Hal ini dilihat dari segi pembangunan di desa dalam mendorong dan menumbuhkan kesadaran para pemimpin, memberikan fasilitas, dan komunikasi yang terjalin kepada para Masyarakat namun ini belum cukup memberikan dampak positif dalam Pelaksanaan Program PNPM Mandiri di desa sehingga dibutuhkan ketegasan kepala desa sebagai pemimpin dalam pemecahan masalah yang terjadi di Desa Sei Barang Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau.*

*Faktor-faktor yang menghambat dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Sei Barang Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau, antara lain kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap masyarakat mengenai bagaimana sebaiknya program itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan. Dan juga kurangnya kerja sama dalam pembangunan yang direncanakan membuat pembangunan menjadi kurang efektif.*

***Kata Kunci:*** *Pemberdayaan Masyarakat.*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : petrusrijan@yahoo.com

## PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan pembangunan, seluruh elemen Indonesia bangsa berkeinginan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Melalui berbagai program pembangunan, harapan dan taraf hidup rakyat ditinggalkan secara bertahap dan berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan amanat sebagai konstitusi yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pembangunan dilaksanakan dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat.

Pembangunan Nasional merupakan pencerminan kehendak untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan pemahaman masyarakat tentang pembangunan yang dirumuskan dan strategi pencapaiannya sehingga dapat terlaksana secara optimal.

Otonomi berarti penyelenggaraan pemerintah sebagai urusan rumah tangga yang berdiri sendiri, yang meliputi tahapan perencanaan pembangunan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap hasilnya. Tujuannya adalah upaya sistematis dan terpadu untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, serta tetap menjaga keserasian relasi antara pemerintah pusat dengan daerah.

Sebagai sistem manajemen pembangunan, maka fungsi koordinasi dalam bidang pemerintahan dan pembangunan sangat diperlukan. Dalam hal ini manajemen akan membantu terjadinya hubungan, komunikasi dan kerja sama yang harmonis antar berbagai unsur yang terlibat dalam suatu kegiatan bersama. Sehingga setiap unsur yang terlibat dalam aktifitas kerja sama tersebut saling memahami peran dan posisi masing-masing.

Pembangunan desa yang terlalu bertumpu pada alokasi dan distribusi dana yang sentralistik, akan mengurangi kreatifitas dan komitmen masyarakat desa, kurang menumbuhkan pembangunan yang berdasarkan kepercayaan diri dan menimbulkan ketergantungan masyarakat yang terlalu besar pada pemerintah. Bahwa penekanan alokasi dana yang sentralistik dan berkepanjangan telah menumbuhkan mental masyarakat ketergantungan dan mengurangi daya kreatifitas serta daya inovasi. Pembangunan desa dalam rangka mempercepat proses pembangunan desa, dengan diturunkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau, Kabupaten Malinau akan melakukan kegiatan pembangunan yang akan memperkuat proses Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta mengupayakan adanya keseimbangan dan kesinambungan proses pembangunan sosial, ekonomi, serta penguatan kelembagaan desa dan penyediaan prasarana sosial ekonomi desa. Bahwa tidak semua usulan-usulan pembangunan yang diajukan oleh desa dapat diakomodir dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Dinas/instansi terkait dan dibiayai APBD Kabupaten Malinau, juga dalam Pengembangan Wilayah Kecamatan Terpadu (PWKT), sehingga diperlukan suatu program yang diharapkan mampu untuk mengakomodir usulan-usulan desa berdasarkan potensi desanya, serta

permasalahan-permasalahan yang ada di desa. Dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) perlu diarahkan pada terwujudnya “desa yang mandiri” yaitu desa yang mempunyai semangat untuk membangun yang tinggi, mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya, merumuskan rencana untuk memecahkan permasalahan, serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefisien dan seefektif mungkin, dengan pertama-tama bertumpu pada sumberdaya dan dana yang berasal dari masyarakat desa, dan mampu menjaga proses pembangunan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya pemberdayaan masyarakat, pemerintah kabupaten malinau perlu memandang untuk memberikan bantuan desa dalam bentuk melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) program ini menggunakan paradigma pembangunan yang terfokus pada pemberdayaan rakyat, yaitu paradigma memposisikan masyarakat sebagai pusat pembangunan baik dalam konstruksi konsep dan praktek pembangunan, yang menyetarakan kehendak dan kreatifitas rakyat, yang mengembangkan kemampuan rakyat, dan yang menimbang penilaian terhadap hasil pembangunan.

Dalam pelaksanaannya, PNPM Mandiri pedesaan menekankan prinsip-prinsip pokok sebagai berikut: transparansi dan akuntabilitas, disentralisasi, keberpihakan kepada masyarakat miskin, otonomi, partisipasi, prioritas usulan, kesetaraan dan keadilan gender, kolaborasi dan berkelanjutan. PNPM Mandiri pedesaan juga memiliki prinsip lainnya yakni: bertumpu pada pembangunan manusia dan demokrasi.

Pelaksanaan PNPM Mandiri di Desa Sei Barang Kecamatan Kayan Selatan Kabupaen Malinau merupakan daerah perbatasan yang sangat sulit dilakukan pembangunan. Karena kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan program PNPM Mandiri, dan juga kurangnya sumber daya manusia mengakibatkan lambatnya pelaksanaan program PNPM Mandiri di Desa Sei Barang. PNPM melakukan pembangunan pada semenisasi jalan, membuat posyandu, membuat kantor desa, rehap balai desa, dan membuat jembatan. Hal ini terhambat karena pekerjaan masyarakat yang kebanyakan bekerja sebagai petani. Selanjutnya semenisasi jalan terhambat karena pasir sangat kurang dan lokasinya cukup jauh. Mengingat banyaknya kendala yang dihadapi terutama dari faktor topografi dan geografis yakni sulitnya untuk menjangkau daerah perbatasan karena sebagian besar masih berupa hutan, perbukitan dan pegunungan dengan lembah yang sempit, sehingga biaya transportasi dan komunikasi menjadi sangat mahal. Akibatnya, pelaksanaan PNPM Mandiri yang dilakukan membutuhkan biaya yang besar dan waktu pekerjaan yang relatif lebih lambat.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul “Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Sei Barang Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau.”

### ***Rumusan Masalah***

1. Bagaimana pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Sei Barang Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau?
2. Faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Desa Sei Barang Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau?

### ***Tujuan Penelitian***

1. Untuk mengetahui dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Desa Sei Barang Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sei Barang Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau.

### ***Kegunaan Penelitian***

1. Secara teoritis
  - a. Untuk pengembangan keilmuan, menambah, memperdalam dan menyumbangkan pengetahuan penulis mengenai pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.
  - b. Sebagai bahan latihan dalam memanfaatkan hasil penelitian sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah di Universitas Mulawarman.
2. Secara praktis
  - a. Diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan oleh pemerintah Kabupaten Malinau khususnya dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang akan datang.
  - b. Sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan bagi semua pihak yang memerlukan hasil penelitian ini.

## **KERANGKA DASAR TEORI**

### ***Konsep Kebijakan***

Menurut George C Edwars III dan Sharkanky (dalam Islamy 2004:18) adalah “ *is what government say and do. It is the goals or porpuse of government programs*“ artinya “ apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Carl J. Friedrich (dalam Lubis 2007:7) mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian konsep tindakan yang diusulkan oleh seseorang atau sekelompok orang atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menentukan hambatan-hambatan dan peluang, terhadap pelaksanaan tersebut dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan.

Carl J. Friedrich (dalam Lubis 2007:7) mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian konsep tindakan yang diusulkan oleh seseorang atau sekelompok orang atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan

menentukan hambatan-hambatan dan peluang, terhadap pelaksanaan tersebut dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan.

### ***Konsep Kebijakan Publik***

Suharto (2008:19) kebijakan publik adalah sebuah instrument pemerintah, bukan saja dalam arti Government yang hanya menyangkut aparatur Negara, melainkan pula Governance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan artinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga Negara.

William Dunn (dalam Suharto, 2008:22) bahwa mengaitkan pengertian kebijakan dengan analisis kebijakan yang merupakan sisi baru dari perkembangan ilmu sosial untuk pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, sebab itu definisi kebijakan sebagai ilmu sosial terapan menggunakan mentransformasikan informasi-informasi yang relevan yang dipakai untuk memecahkan persoalan dalam kehidupan sehari-hari.

### ***Implementasi Kebijakan***

Daniel Masmanian dan Paul Sabatier (dalam Agustino 2006:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin di capai dan berbagai cara menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

### ***Pengertian Pembangunan***

Menurut Riyadi dan Supriyadi (2003:6) bahwa pembangunan sebagai usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan oleh suatu bangsa, Negara, dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*) pembangunan sebagai perubahan, mewujudkan suatu kondisi suatu kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan suatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan.

### ***Tujuan Pembangunan***

Menurut Amien (2005:162-165) tujuan pembangunan diyakini sebagai sesuatu yang telah ada (bersifat objektif) dan dapat dicapai dengan upaya-upaya tertentu.

### ***Dimensi-Dimensi Pembangunan***

Dalam hal ini Nyoman Sumaryadi (2005:26-28) menyebutkan ada beberapa dimensi-dimensi pembangunan yaitu:

1. Dimensi sosial, hukum, dan budaya menyangkut hubungan antara manusia beserta aspek-aspek. Didalamnya terdapat yaitu:
  - a. Persoalan pola hubungan antara manusia yang optimal sesuai dengan kebiasaan atau kesepakatan lokal.
  - b. Penciptaan hubungan antara manusia yang harmonis dan pencegahan terjadinya perselisian antara ras, suku, agama dan golongan
  - c. Kesempatan yang cukup bagi tiap pemeluk agama untuk menjalankan ajaran Agama.
  - d. Penegakan hukum yang optimal secara ekonomis dan adil bagi semua orang dan sebagainya.
2. Dimensi politik merupakan sisi yang sangat ramai diperdebatkan, mengingat sisi ini sangat menentukan arah-arah tiap sisi yang lain. Sistem politik yang lain adalah sistem yang mampu memperbaiki sisi sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain di daerah.
3. Dimensi ekonomi merupakan sisi yang sering dipandang sebagai yang terpenting dalam semua sisi. Hal ini tentu berlebihan, sebab kehidupan antar manusia tidaklah semata-mata kehidupan ekonomi atau pemenuhan berbagai kebutuhan dalam pengertian sempit, pemenuhan kebutuhan manusia dikatakan langka apabila tidak hanya kebutuhan material yang diperhatikan namun lebih dari itu yakni keseimbangan dari pemenuhan dari seluruh kehidupan.
4. Dimensi keamanan dan lain-lain merupakan sisi yang banyak diterjuni oleh pemerintah dengan sistem pendanaan lewat pembayaran pajak oleh masyarakat dan lain-lain.

### ***Paradigma Pembangunan***

Menyangkut pembangunan ini, Suharto (2005:5) menyebutkan bahwa paradigma pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia apabila disederhanakan, maka dapat dirumuskan kedalam tiga rumus utama dalam pembangunan kesejahteraan sosial, yaitu:

1. Pertumbuhan Ekonomi (*Economy Growth*)
2. Perawatan Masyarakat (*Commonity Care*)
3. Pembangunan Manusia (*Human Devlopment*)

### ***Pembangunan Infrastruktur***

Kemudian berbicara tentang infrastruktur, Bachtiar Effendi, (2002:48) menyebutkan bahwa pentingnya ketersediaan infrastruktur yang memadai yang berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik baik prasarana pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, listrik, jalan, jembatan, transportasi, air bersih, drainase, teknologi dan komunikasi bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan ekonomi, serta para investor mau menanamkan modalnya di daerah, karena apabila tidak demikian biaya yang dikeluarkan untuk penanaman modal lebih besar dan berpengaruh pada harga produk yang dihasilkan dan tentunya akan lebih mahal dibanding dengan yang lain. Sehingga produk yang dihasilkan tidak kompetitif..

## ***Konsep Kemandirian Desa***

Meskipun pembangunan desa selalu menjadi fokus pemerintah sejak Indonesia mengawali kemerdekaannya, namun sosok strategi pembangunan desa sering kali mengalami perubahan. Hal ini memantifestasikan, bukan hanya proses pencharian strategi pembangunan desa yang dipandang paling efektif untuk suatu kurun waktu tertentu, akan tetapi juga merefleksikan pengaruh strategi pembangunan nasional pada tingkat makro yang dianut dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian dari kewaktu-kewaktu kita mengenal varian strategi pembangunan desa.

### ***Pengertian Desa***

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tenteng Desa, Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan kata lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### ***Pengertian Kemandirian***

Robert Havigherst (1972:48) merupakan bahwa kemandirian terdiri dari beberapa aspek yaitu:

1. Emosi, aspek ini di tunjukan dengan kemampuan mengontrol emosi dan tidak tergantung kebutuhan emosi dari orang tua.
2. Ekonomi, aspek ini ditunjukan dengan kemampuan mengatur ekomomi dan tidak tergantung kebutuhan ekomomi pada orang tua.
3. Intelektual, aspek ini ditunjukan dengan kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi.
4. Sosial, aspek ini ditunjukan dengan kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain tidak tergantung dan menunggu aksi dari orang lain.

### ***Prinsip Pembangunan Desa***

Menurut Adisasmita (2006:20), pembangunan didesa dilakukan dengan pendekatan secara multisektoral Partisipatif, berlandaskan pada semangat kemandirian, berwawasan lingkungan berkelanjutan serta melakukan pemanfaatan sumberdaya pembangunan secara serasi, selaras, dan sinergis sehingga tercapai optimallitas.

### ***Sasaran Pembangunan Pedesaan***

Menurut Rahardjo Adisasnita (2006:23-24) sasaran yang diharapkan dapat dicapai pembangunan pedesaan adalah pertumbuhan ekonomi pedesaan yang berbasis sumberdaya pertanian yang ditunjang oleh sektor non pertanian dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kebutuhan masyarakat kecil. Sasaran umum tersebut dapat dikelompokan menjadi beberapa sasaran khusus sebagai berikut:

1. Tersedianya fasilitas infrastruktur fisik dan sosial yang mencakup jaringan jalannya fasilitas pendidikan dan kesehatan yang tersebar diseluruh wilayah.
2. Terlaksananya pembangunan ekomomi yang mencakup ketersediaan sumber-sumber penghasilan, produktifitas pertanian yang tinggi, dan tingkat efisiensi yang tinggi dalam pemanfaatan sumberdaya alam.
3. Terciptanya kelestarian lingkungan yang meliputi terciptanya kesadaran akan arti pentingnya lingkungan, berkembangnya kepedulian lingkungan semua pihak, dan adanya upaya nyata untuk menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi.

### ***Konsep Pemberdayaan Masyarakat***

Menurut Ife (dalam Suhendra, 2006:77) pemberdayaan adalah meningkatkan kekuasaan atas mereka yang kurang beruntung, dari definisi tersebut, maka pemberdayaan masyarakat menurut Reonard d. White (dalam Suhendra 2006:77) adalah upaya terus-menerus untuk menghasilkan suatu kemandirian. Pemberdayaan harus berawal dari kemauan politik para penguasa

### ***Tujuan Pemberdayaan Masyarakat***

Pendapat lain (dalam Suhendra 2006:86) konsep pemberdayaan sebagai suatu konsep alternatif pembangunan, yang pada intinya memberikan tekanan ekonomi pengambilan suatu keputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung (melalui partisipasi), demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung. Dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat mandiri sebagai upaya pemerintah dalam pengetasan kemiskinan diharapkan masyarakat dapat memiliki akses terhadap sumber-sumber ekonomi maupun memperoleh kesejahteraan dari kemampuan dalam memenuhi kebutuhannya.

### ***Pengertian PNPM Mandiri***

PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud krangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekenisme dan prosedur program, penyediaan penyampingan, dan pendanaan stimulant untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya menanggulangi kemiskina yang berkelanjutan. (pedoman umum PNPM): 11)

### ***Tujuan PNPM Mandiri***

PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

### ***Definisi Konsepsional***

Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Sei Barang Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau adalah pelaksanaan-pelaksanaan program yang memberdayakan masyarakat melalui pembangunan posyandu, perbaikan balai Desa, semenisasi jalan serta perbaikan jembatan yang ada di Desa Sei Barang Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau.

## **METODE PENELITIAN**

### ***Jenis Penelitian***

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu metode dengan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian seseorang, pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

### ***Fokus Penelitian***

1. Pelaksanaan PNPM Mandiri di Desa Sei Barang kecamatan kayan selatan Kabupaten Malinau.
  - a. Pembangunan Balai Desa
  - b. Pembangunan Posyandu.
  - c. Semenisasi jalan.
  - d. Perbaikan Jembatan.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Sei Barang Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau.

### ***Sumber dan Jenis Data***

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala Desa dan Masyarakat Desa Sei Barang Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau.. Sedangkan data yang dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer yaitu Sumber data Penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber asli, antara lain sebagai berikut:

- A. *Key informan* (Informasi Kunci) yaitu Ketua PNPM Mandiri dan Kepala Desa sebagai pimpinan dalam Desa (*Porposive Sampling*).
- B. Informannya yaitu Anggota PNPM (*Porposive Sampling*) yang tugasnya berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- C. Informannya yaitu masyarakat (*Accidental Sampling*) yang tugasnya berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah Data Penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip. Seperti data-data yang mendukung dari buku-buku yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Untuk menunjang

penelitian ini diambil dari dokumen-dokumen yang ada di Kantor Desa Sei Barang Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau.

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Untuk mendapatkan data tersebut, maka diperlukan adanya metode tertentu dalam pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan datanya yaitu dengan menggunakan :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*), artinya penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan teori dan data dari perpustakaan berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumen yang ada hubungannya dengan ruang lingkup penelitian ini, yang dipergunakan sebagai landasan pemikiran dan pembahasan.
2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*), darinya penulis langsung mengadakan penelitian kelapangan dengan mempergunakan beberapa cara yaitu :
  - a. Observasi: yaitu pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan data yang diperlukan.
  - b. Wawancara (*interview*), yaitu penulis mengadakan tanya jawab dengan beberapa responden untuk melengkapi keterangan-keterangan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
3. Penelitian dokumen atau dokumen *research* artinya penelitian terhadap seluruh dokumen atau arsip-arsip yang menyangkut masalah Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Sei Barang Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau.

### ***Teknik Analisis Data***

Dalam hal ini menurut Miles dan Huberman (1984), (dalam Sugiyono 2013:183) menjelaskan bahwa analisis data kualitatif merupakan proses siklus dan interaktif yang bergerak diantara empat sumbu yaitu pengumpulan data, reduksi data, pengajian data, dan penarikan kesimpulan

### ***Pengolahan***

Setelah melakukan penelitian yang diperoleh dari lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi seperti yang telah dilakukan oleh penulis. Selanjutnya adalah pembahasan dari suatu penelitian untuk mengetahui gambaran yang mengenai Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Sei Barang Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau.

## **HASIL PENELITIAN**

### ***Program Pembangunan Balai Desa***

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan balai desa yaitu 75.000.000 hingga renovasi balai desa itu selesai. Dalam pembangunan ini cukup baik hanya saja masih ada kendala yang masih ada seperti kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mengorganisir diri untuk kemajuan dan kemandirian. Hal semacam inilah yang membuat pembangunan balai desa jadi tidak efektif, akan baiknya semua masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan balai desa.

### ***Program Pembangunan Posyandu***

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan posyandu yaitu 110.000.000 hingga pembangunan selesai. Selama ini program pembangunan posyandu sudah terlaksana cukup baik, apa yang diprogramkan terlaksana menurut perencanaan yang telah ditetapkan dari awal sampai terlaksananya pembangunan posyandu ini, walaupun masih ada kendala-kendala yang ada namun bisa teratasi dengan cepat hingga hasil pembangunan posyandu cukup terlaksana dengan baik.

### ***Program Semenisasi Jalan***

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa anggaran yang dikeluarkan untuk Program Semenisasi Jalan yaitu 360.000.000 hingga semenisasi itu selesai, semenisasi yang telah terlaksana sudah cukup baik dalam pelaksanaan kegiatan semenisasi jalan yang telah direncanakan dari awal, pembangunan harus mencapai sasaran yang tepat guna untuk kebutuhan semua masyarakat.

### ***Program Perbaikan Jembatan***

Berdasarkan hasil penelitian anggaran yang dikeluarkan untuk perbaikan jembatan yaitu 36.000.000 hingga perbaikan jembatan itu selesai sesuai dengan harapan. Program Perbaikan Jembatan sudah berjalan dengan cukup baik, pembangunan dalam masyarakat pun mulai ada perubahan walaupun masih ada kendala dalam proses pelaksanaan kegiatan seperti kurangnya material yang diperlukan.

### ***Penutup***

Berdasarkan hasil penelitian Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Di Desa Sei Barang Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau, maka pada bab ini penulis secara garis besar dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Sei Barang Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau yaitu sebagai berikut:
  - a. Dalam kegiatan pembangunan Balai Desa, masyarakat desa saling bekerja sama memperbaiki Balai Desa. Para pria mengambil papan yang sudah digesek serta balok, untuk diberikan kepada yang mengerjakan pembangunan balai desa, dan para wanita ikut membantu menyiapkan konsumsi untuk para masyarakat desa yang bergotong royong. Dalam pelaksanaan pembangunan balai desa anggaran keseluruhan untuk pembangunan balai desa ini yaitu Rp. 75.000.000.00 hingga selesai.
  - b. Dalam kegiatan program Semenisasi Jalan di Desa Sei Barang, seluruh masyarakat terlibat dalam setiap kegiatan mulai dari proses perencanaan, pengambilan pasir dan mengambil batu, dari kegiatan ini masyarakat selalu bekerja sama demi kelancaran serta kemajuan pembangunan desa, dalam kegiatan semenisasi anggaran yang

- dikeluarkan untuk jalan selebar 3 meter dan panjangnya 250 meter yaitu Rp. 360.000.000.
- c. Dalam kegiatan Perbaikan jembatan di Desa Sei Barang seluruh masyarakat terlibat dalam setiap kegiatan, mulai dari proses kegiatan menambang pasir dan batu dan sebagian masyarakat mengesek kayu ulin yang dibutuhkan untuk jembatan, dari kegiatan perbaikan jembatan anggaran yang dikeluarkan sebanyak Rp. 36.000.000.
  - d. Dalam proses pembangunan posyandu seluruh masyarakat ikut berpartisipasi mulai dari membersihkan lahan dimana akan dibangun, dan sebagian masyarakat menyiapkan peralatan serta bahan bangunan yang dibutuhkan, dari kegiatan pembangunan posyandu anggaran yang dikeluarkan sebanyak Rp. 110.000.000.
2. Faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri di Desa Sei Barang Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau yaitu :
- a. Faktor penghambat disini yaitu dimana suatu hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri ialah susah mendapatkan bahan-bahan material yang diperlukan seperti papan, balok ulin, Semen, dan bahan bangunan lainnya, karena habisnya stok dan susah pesan karena butuh waktu lama karena jalan transportasinya kurang bagus atau kurang diperhatikan oleh pemerintah.
  - b. Faktor pendukung pelaksanaan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri, masyarakat desa saling mendukung dalam pelaksanaan program, fokus pada kegiatan yang dilakukan. Beberapa hal ini sangat penting dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan.

### **Saran**

Setelah melalui beberapa macam tahap-tahap penelitian dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri di Desa Sei Brang Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau, maka penulis memberikan saran-saran kepada beberapa pihak yang terkait dengan penelitian ini, adapun saran yang penulis ingin kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Di perlukan penyesuaian jadwal-jadwal kegiatan PNPM Mandiri di Desa dengan pekerjaan masyarakat sehari-hari agar tidak terjadinya benturan waktu sehingga tidak menghambat pelaksanaan prograam PNPM Mandiri.
2. Diperlukan sosialisasi kegiatan memberikan pemahaman tentang Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri di masyarakat Desa secara lebih jelas agar masyarakat lebih memahami kegiatan PNPM Mandiri di Desa Sei Barang
3. Diharapkan kepada masyarakat kedepannya lebih kompak dalam kerja sama demi lancarnya program pembangunan yang ada dalam Desa.

4. Diharapkan kepada masyarakat kedepannya lebih memperhatikan bahan atau material yang diperlukan terlebih dahulu, supaya kegiatan pembangunan lancar terlaksana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Agustino, Leo. 2006, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Amien, Mappadjantji A. 2005. *Kemandirian Lokal*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bachtiar, Efendi. 2002, *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*, Kurnia Kalam Semesta, Yogyakarta.
- Efendi, Bachtiar. 2002, *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*, Kurnia Kalam Semesta, Yogyakarta.
- Efendi, Bachtiar. 2002, *Pembangunan Ekonomi Daerah Berkeadilan* . Kurnia Kalam Semesta. Yogyakarta.
- Islamy, M. Irfan. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Universitas Terbuka
- Kartono, Kartini, 2006. *Pemimpin dan Kepemimpinan, Raya Gafindo Persada*. Jakarta.
- Kodoatie, Robet, 2005. *Pengantar manajemen infrastruktur*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Lubis, M. Solly. 2007, *Kebijakan Publik*, Bandung : Mandar Maju.
- Maleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit Remaja Pusda Karya : Bandung.
- Milles, B. Matthew B dan Huberman, A. Michael. 1992, *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia Pers : Jakarta.
- Nyoman, 1, Sumaryadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*: CV. Citra Utama.
- Riyadi dan Supriyadi, Deddy Bratakusuma. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Mengali potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia pustaka Utama.

Sumaryadi, 1, Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembinaan Daerah dan Pembedayaan masyarakat*: CV. Citra Utama.

Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung; Alfabeta.

Suharto, Edi. Analisis kebijakan publik panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan social. Penerbit cv Alfabeta. Bandung. 2005.

Suhendra. 2006. *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Alfabeta.

### **Dokumen-dokumen:**

Anonim, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*.

### **Sumber dari internet**

Barnadib, Dali, Havighurst n. d *kemandirian*  
([http://mapalipma.blogspot.com/2008/10/perencanaan\\_desa\\_menuju\\_desa\\_mandiri.html](http://mapalipma.blogspot.com/2008/10/perencanaan_desa_menuju_desa_mandiri.html), diakses 23 Maret 2009)